

BAB VI

PENUTUP

1.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Pengelolaan belanja modal Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2015 belum dikatakan efektif karena dalam pengelolaannya masih terdapat tahapan-tahapan yang belum berjalan dengan baik.
2. Pada tahap perencanaan, sudah dikatakan efektif karena Dinas Kesehatan dalam perencanaannya sudah memperhatikan permintaan masyarakat melalui permohonan proposal setiap kabupaten dan musrenbang. Namun dalam tahap ini Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur hanya merencanakan 4 (empat) item belanja modal yaitu peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan belanja aset tetap lainnya.
3. Pada tahap pelaksanaan, dikatakan kurang efektif karena dari besarnya anggaran yang ditetapkan masih terdapat banyak anggaran yang tersisa. Hal ini dikarenakan adanya penghematan anggaran oleh Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sedangkan pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, Dinas Kesehatan pada tahun anggaran 2015 terlambat melaporkan Surat Pertanggungjawaban ke bagian keuangan Gubernur.

4. Untuk tahap pengawasan, diketahui masih terdapat kelalaian dari pihak pengawas dalam hal ini kontraktor sehingga mengakibatkan terlambatnya pembangunan dari waktu yang telah ditetapkan. Kurangnya pengawasan juga dimanfaatkan oleh para pekerja untuk melakukan kecurangan terhadap bahan – bahan bangunan.

1.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, agar lebih memperhatikan pengelolaan belanja modalnya khususnya pada tahap pelaksanaan agar lebih memanfaatkan dengan baik anggaran yang telah diberikan Pemerintah Provinsi sehingga masyarakat benar-benar merasakan hasil dari pembangunan tersebut.
2. Bagi pihak kontraktor, agar tidak lalai dalam mengawasi para pekerja sehingga tidak terjadi kecurangan dan bisa selesai tepat pada waktu yang telah ditentukan.
3. Bagi peneliti lain, diharapkan tulisan ini dapat dijadikan rujukan bagi peneliti lain guna melakukan penelitian lebih lanjut dalam lingkup yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2015. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.
- Anonim, 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Anonim, 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Anonim, 2016. Peraturan Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Anonim, 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Anonim, 2004. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Anonim, 2013. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kupang Tahun Anggaran 2013.
- Bastian, Indra, 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Erlangga, Jakarta.
- Nordiawan, Dedi. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Mahmudi. 2009. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Erlangga.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi ke – 2. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Marlina, Fina. 2010. *Pengelolaan Belanja Modal Pada Kantor Gubernur Jambi Sesuai PP Nomor 58 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Universitas Andalas.
- Mala, Septiana. 2008. *Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan kinerja keuangan daerah dengan PAD sebagai variabel intervening (Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah)*. Universitas Diponegoro